

Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Desi Liana¹⁾, Titin Agustin Nengsih²⁾, Firman Syah Noor³⁾

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: desiliana366@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: nengsih@uinjambi.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: firmanayahnoor@uinjambi.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Village Government of Advanced Work Forward Regency Tanjung Jabung Regency based on the ratio of decentralization, the ratio of local financial independence, the ratio of regional financial effectiveness, shopping efficiency and the growth ratio of regions. This research is a quantitative descriptive study. Using secondary data in the form of reports of the realization of the Village Revenue and Shopping Budget (APBDes) Karya Forward Regency, Tanjung Jabung West Regency, for the 2021-2024 period. The results of this study indicate that the financial performance of the Advanced Works Village government based on the ratio of decentralization degrees categorized as less, Regional financial independence ratio is categorized as low as criteria and destructive relationship patterns, the ratio of regional financial dependency on efektif, the ratio of the effectiveness of Regional Revenue in categorized as efektif, shopping efficiency is not efficient and growth ratios.

Keywords : Financial Performance, Regional Financial Ratio

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia sistemnya adalah desentralisasi, di mana kewenangan pemerintahan pusat dialihkan kepada setiap daerah otonom guna mengelola serta memiliki tanggung jawab secara mandiri atas daerah yang dipimpinnya (Rakkas, 2019). Di bawah pemerintahan daerah, desa merupakan suatu kesatuan pemerintahan. Desa ialah unit pemerintahan paling kecil yang berada di bawah kendali seorang kepala desa yang bertugas mengawasi berbagai urusan pemerintahan tingkat desa (Yosef, 2023). Pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, masyarakat desa harus mengetahui setiap tindakan yang dilakukan, terutama dalam hal penanganan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahmud Rifa'i, 2022). Pemerintah desa dalam mengelola keuangan diukur berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Angka ini menggambarkan kapasitas keuangan desa untuk pertumbuhan dan pelayanan masyarakat, dan inisiatif pemerintah lainnya. APBDes ini berfungsi sebagai alat perencanaan yang penting dalam memastikan bahwa dana yang tersedia dapat dipakai secara tepat guna menggapai pencapaian pembangunan desa.

Analisis kinerja pemerintah desa dikatakan sangat penting dalam menilai kondisi suatu desa. Kinerja keuangan pemerintah desa dapat dianalisis melalui Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini membandingkan antara anggaran yang dimaksudkan dengan bagaimana anggaran tersebut benar-benar dilaksanakan selama jangka waktu tertentu. Memperkirakan sumber daya keuangan yang direncanakan untuk diperoleh guna mendukung operasi pemerintahan desa di masa mendatang menjadi lebih mudah dengan bantuan laporan ini, dengan menampilkan analisis perbandingan (Ita, 2023). Analisis kinerja keuangan terkait APBDes berfungsi guna mengevaluasi perbandingan hasil keuangan dari satu periode ke periode selanjutnya guna memahami perkembangan kinerja keuangan desa. Selanjutnya, gambaran yang

lebih menyeluruh dapat diperoleh melalui penerapan analisis rasio keuangan. Jika kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah rendah, hal ini sering kali menyebabkan siklus negatif, yaitu berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Hery Susanto, 2019).

Sumber daya alam dan sumber daya manusia pada Desa Karya Maju ialah sebuah potensi perihai merealisasikan pembangunan bagi Desa Karya Maju. Desa Karya Maju berada di kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Desa ini terbagi menjadi empat dusun, yakni Dusun Karya Indah, Dusun Mulya, Dusun Simpang Raya, dan Dusun Sungai Nyiur. Perekonomian Desa Karya Maju masih didominasi oleh sektor pertanian. Selain mengelola lahan pertanian, masyarakat juga mengembangkan komoditas seperti kelapa sawit, kelapa, pinang, serta beternak ayam, kambing, dan sapi, meskipun skala peternakannya masih terbatas. Potensi-potensi ini berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan berperan perihai meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Karya Maju.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
Pemerintah Desa Karya Maju Tahun 2021-2024

URAIAN	Tahun			
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023(Rp)	2024 (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	Rp 20.528.000,00	Rp 8.834.000,00	Rp 50.363.500,00	Rp 38.112.100,00
Pendapatan Transfer	Rp 2.256.618.000,00	Rp 2.094.591.000,00	Rp 2.235.868.000,00	Rp 2.871.200.000,00
Dana Desa	Rp 1.202.026.000,00	Rp 973.663.000,00	Rp 1.033.051.000,00	Rp 1.046.583.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 39.594.000,00	Rp 34.194.000,00	Rp 35.569.000,00	Rp 39.311.000,00
Alokasi Dana desa	Rp 954.998.000,00	Rp 986.734.000,00	Rp 1.067.248.000,00	Rp 1.685.306.000,00
Bantuan keuangan Provinsi	Rp 60.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00
Pendapatan Lain-Lain	Rp 0,00	Rp 10.000.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 2.227.146.000,00	Rp 2.113.425.000,00	Rp 2.286.231.500,00	Rp 2.909.312.100,00
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 903.664.400,00	Rp 873.827.000,00	Rp. 945.314.700,00	Rp 993.586.200,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.455.337.300,00	Rp 299.965.000,00	Rp 260.285.500,00	Rp 1.408.413.100,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 55.200.000,00	Rp 82.600.000,00	Rp 154.465.500,00	Rp 128.796.000,00
Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp 43.887.000,00	Rp 406.388.000,00	Rp 568.251.000,00	Rp 266.725.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 79.200.000,00	Rp 618.480.000,00	Rp 279.564.800,00	Rp 105.064.800,00
JUMLAH BELANJA	Rp 2.537.308.700,00	Rp 2.281.260.000,00	Rp 2.207.881.500,00	Rp 2.974.585.100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp (260.162.700,00)	Rp (167.835.000,00)	Rp 78.350.000,00	Rp (65.273.000,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	Rp 367.323.700,00	Rp 261.217.000,00	Rp 81.650.000,00	Rp 120.273.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 107.161.000,00	Rp 93.382.000,00	Rp 160.000.000,00	Rp 55.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC	Rp 260.162.700,00	Rp 167.835.000,00	Rp 78.350.000,00	Rp 65.273.000,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp 0,00	Rp 0.00	Rp 0,00	Rp 0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Karya Maju Tahun 2021-2024

Berdasarkan Tabel 1.1, terdapat berbagai persoalan finansial yang dihadapi oleh Desa Karya Maju, diantaranya: (1) Masih bergantungnya pemerintahan desa terhadap transferan dana dari pemerintahan pusat yang tinggi, di mana dalam periode 2022-2024 pendapatan transfer terus meningkat. (2) Kesanggupan desa perihal pengelolaan serta menggali sumber pendapatan rendah, dengan demikian penerimaan PAD masih kecil dibanding penghasilan dari transfer dana. (3) Terjadi penurunan jumlah pendapatan dari tahun 2021 ke 2022, yakni dari Rp. 2.277.146.000,00 menjadi Rp. 2.113.425.000,00, yang berdampak pada berkurangnya dana desa untuk melaksanakan kegiatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (4) Dari sisi belanja, terjadi penurunan dari tahun 2021 hingga 2023, yang ditandai dengan adanya defisit anggaran, meskipun jumlah belanja tetap lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima.

Kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan seberapa baik pemerintah desa mampu menilai, mengoordinasikan, dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimilikinya. Hal ini bertujuan untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memfasilitasi pembangunan desa tanpa terlalu bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Untuk mengetahui apakah suatu desa berada dalam kondisi keuangan yang sehat, diperlukan analisis yang menyeluruh terhadap keuangan desa. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menganalisis laporan realisasi anggaran yang telah disusun dan dilaksanakan. Melalui analisis rasio keuangan, dapat dilihat sejauh mana pemerintah desa berhasil mengelola dan mengendalikan keuangan desanya. Pemerintah menetapkan nilai nominal setiap desa sebelum mengalokasikan dana. Sebab, setiap desa mendapat nilai yang berbeda berdasarkan jumlah penduduk, wilayah, tingkat kemiskinan dan kesulitan topografi. Untuk meningkatkan keadilan dan mendorong pembangunan desa memberikan bantuan dana kepada masyarakat agar dapat berkembang dan mencapai potensinya secara maksimal adalah hal yang harus dilakukan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rasio keuangan, seperti Rasio Derajat Desentralisasi, digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah desa. Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pendapatan Asli Desa (PADes) memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kapasitas keuangan desa untuk membiayai sendiri pelayanan masyarakat, pembangunan, dan operasional pemerintahan diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah dimana mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Rasio Efektivitas Penghasilan Asli Daerah mengukur sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola penerimaan PADes sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, dengan perbandingan realisasi penerimaan PADes terhadap anggaran yang direncanakan. Rasio Efisiensi Pengeluaran mengevaluasi seberapa baik inisiatif penghematan anggaran pemerintah berjalan. Rasio Pertumbuhan mengevaluasi kemampuan pemerintah desa untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian keuangan mereka dari waktu ke waktu (Mahmudi, 2019).

Dengan menurunnya anggaran pendapatan, fluktuasi dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) Karya Maju, serta jumlah pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatan, peneliti merasa perlu untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Karya Maju, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi dengan harapan guna menyediakan informasi penting bagi perumusan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola keuangannya secara efektif, apakah telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, atau justru menyebabkan penurunan kualitas layanan publik dan ketidakmampuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui apakah suatu desa berada dalam kondisi keuangan yang sehat, diperlukan analisis yang menyeluruh terhadap keuangan desa. Menganalisis laporan realisasi anggaran yang

direncanakan dan dilaksanakan adalah salah satu metode untuk melakukan ini. Melalui analisis rasio keuangan, dapat dilihat sejauh mana pemerintah desa berhasil mengelola dan mengendalikan keuangan desanya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Karya Maju, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tahun Anggaran 2021–2024. Enam rasio lainnya yang digunakan adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Efektivitas PADes, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Pertumbuhan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dan sumbernya. Pemerintah Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun data tersebut menjadi sebuah laporan dengan judul “Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (APBDes) Tahun Anggaran 2021–2024. Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2021-2024.

Berdasarkan penjelasan konsep di atas, maka diperoleh variabel operasional yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Operasional Variabel

Variable	Definisi	Rumus	Skala
Derajat Desentralisasi	Merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kontribusi PADes terhadap penerimaan daerah.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Kemandirian Keuangan	menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (pemerintah pusat dan provinsi).	$\frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100\%$	Rasio
Ketergantungan Keuangan	menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$	Rasio
Efektivitas	Keterkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang tercapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan, tujuan, atau	$\frac{\text{Pendapatan PADes}}{\text{Anggaran PADes}} \times 100\%$	Rasio

	sasaran suatu kegiatan, maka semakin efektif pula organisasi tersebut.		
Efisiensi Belanja	merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal.	$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi PADes}} \times 100\%$	Rasio
Pertumbuhan	Menilai sejauh mana suatu perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam industri yang serupa.	$\frac{\text{PADes Pn}-\text{PADes Po}}{\text{PADes Po}} \times 100\%$	Rasio

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio laporan keuangan:

1) Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Rasio ini menggambarkan kontribusi PADes terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar kontribusi PADes, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi. Berikut ini adalah rumus untuk rasio ini:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Penilaian Perhitungan Derajat Desentralisasi

Persentase %	Kriteria
0,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber : (Maulina dan Rhea, 2019)

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah uang yang diterima dari pinjaman dan transfer dana dari pemerintah pusat atau provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini berguna karena menunjukkan seberapa besar suatu daerah dapat mengandalkan pendapatannya sendiri, seperti pajak dan retribusi, dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari luar. Rasio ini semakin tinggi, semakin besar tingkat kemandirian daerah, yang menunjukkan kemampuannya dalam membiayai kebutuhan sendiri tanpa bergantung secara signifikan pada dana dari luar (Kamilaus, 2020). Kemampuan suatu daerah untuk menangani dan membiayai kebutuhan keuangannya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat, meningkat seiring dengan rasio kemandirian keuangannya. Hal ini akan mempengaruhi pola interaksi keuangan antara kedua pemerintah, yang bisa berupa pengurangan alokasi dana dari pusat atau peningkatan kewenangan daerah dalam mengelola keuangan. Berikut rumus dalam menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Pola Hubungan, tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327,1996 (Dalam Amelia dan Ira Mariana, 2020).

3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan adalah kondisi di mana suatu organisasi bergantung pada organisasi lain, sehingga tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sendiri. Dalam konteks organisasi pemerintah, pemerintah desa bergantung pada dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat atau provinsi (Amelia, 2020). Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat ditunjukkan oleh rasio ini. Jika rasio ini besar, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dianggap kuat. Pendapatan daerah yang kuat akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Berikut ini adalah rumus untuk rasio ini:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Penilaian Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase %	Kriteria
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Tinggi
>50,01	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri RI dan Fisipol-UGM, 1991 dalam (Santoso et al., 2021).

4) Rasio Efektivitas

Ruki Ambar Arum (2022:214) mengatakan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas mengukur seberapa dekat hasil tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. Suatu organisasi lebih efektif jika hasilnya memiliki dampak yang signifikan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merujuk pada sejauh mana hasil dari suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dianggap efektif jika hasil yang dicapainya selaras dengan rencana awal yang telah disusun, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam konteks sektor publik, efektivitas sangat berkaitan dengan hasil operasional yang dicapai oleh lembaga atau pemerintah. Suatu operasional dikatakan efektif jika mampu memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa sumber daya yang digunakan dalam operasional tersebut harus dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan hasil yang jelas dan terukur. Keberhasilan operasional ini, pada akhirnya, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan (Mega Oktavia Ropa, 2016). Gunakan rumus berikut untuk menghitung rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PADes}}{\text{Anggaran PADes}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Penilaian Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mohammad Mahsan (2016:130).

5) Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini menampilkan selisih antara jumlah uang yang dikumpulkan dengan biaya yang

dikeluarkan untuk mengumpulkannya. Jika rasionya kurang dari satu atau kurang dari 100%, kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai efisien. Semakin efisien pemerintah daerah mengelola proses pengumpulan pendapatan, semakin rendah rasionya karena jumlah yang dibelanjakan lebih sedikit daripada jumlah yang dihasilkan. Dengan kata lain, rasio yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengelola keuangannya dengan lebih baik dan lebih efektif dengan mengumpulkan dana dan membelanjakannya dengan hemat. Rumus berikut dapat digunakan untuk mendapatkan rasio efisiensi pengeluaran ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Desa}} \times 100\%$$

Tabel 2.6

Kriteria Perhitungan Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi	Persentase (%)
Tidak Efisien	>40
Kurang Efisien	31-40
Cukup Efisien	21-30
Efisien	10-20
Sangat Efisien	<10

Sumber : Mahsun, (2012)

6) Rasio Pertumbuhan

Seri Suriani (2022, 23) menjelaskan bahwa rasio adalah ukuran yang menunjukkan posisi perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan atau dalam sektor yang sama. Rasio pertumbuhan diperoleh dengan membandingkan angka pada suatu tahun tertentu dengan angka pada tahun dasar, di mana tahun dasar dianggap sebagai 100%. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya serta bersaing dengan competitor lain pada industri sama. Rasio pertumbuhan digunakan untuk melihat perkembangan setiap bagian dari pendapatan dan pengeluaran, sehingga bisa membantu menilai area yang membutuhkan perhatian lebih. Rasio ini juga berguna untuk melihat apakah kinerja anggaran pemerintah atau lembaga menunjukkan pertumbuhan yang baik atau buruk dalam tahun fiskal tertentu atau selama beberapa tahun (Rasta Seviafani, 2023).

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah desa untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Jelas dari pernyataan sebelumnya bahwa tingkat pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah desa untuk menjaga dan memperkuat kondisi keuangannya. Jika rasio pertumbuhan meningkat setiap tahunnya, maka dianggap positif (Arthaingan H. Muthi, 2016). Berikut ini adalah rumus rasio pertumbuhan:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PADes Pn} - \text{PADes Po}}{\text{PADes Po}} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Pendapatan Asli Desa yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Pendapatan Asli Desa yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Tabel 2.7

Kriteria Penilaian Tingkat Pertumbuhan

Kriteria Pertumbuhan	Tingkat Pertumbuhan %
Sangat Rendah	0%-10%
Rendah	11%-20%
Sedang	21%-30%
Tinggi	Diatas 40%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Indiskayani,dkk 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Rasio Derajat Desentralisasi

Penghitungan rasio ini dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rumus perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Adapun perolehan hasil perhitungan rasio ini bisa dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi

Pemerintah Desa Karya Maju Tahun Anggaran 2021-2024

No.	TA	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	(%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	2021	20.528.000,00	2.277.146.000,00	0.90%	Sangat Kurang
2	2022	8.834.000,00	2.113.425.000,00	0.42%	Sangat Kurang
3	2023	50.363.500,00	2.286.231.500,00	2.20%	Sangat Kurang
4	2024	38.112.100,00	2.909.312.100,00	1.31%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Dari hasil perhitungan Tabel 3.1 diatas bisa dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Karya Maju jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi tahun anggaran 2021-2024 menunjukkan hasil fluktuatif. Pada tahun 2021 rasio derajat desentralisasi sebesar 0,90%, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,42%, kemudian pada tahun 2023 kenaikan sebesar 2,20%, serta menurun kembali pada tahun 2024 sebesar 1,31%. Kemampuan keuangan desa Karya Maju secara keseluruhan terbilang sangat kurang, dikarenakan berada pada persentase 0,00-10,00%.

3.1.2. Rasio kemandirian Keuangan Daerah

Penghitungan rasio ini dengan melakukan perbandingan total penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta provinsi serta pinjaman daerah. Rumus perhitungan rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Perolehan hasil setelah dihitung dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Desa Karya Maju Tahun Anggaran 2021-2024**

No	TA	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer Pusat+Provinsi (Rp)	(%)	Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
1	2021	20.528.000,00	2.256.618.000,00	0.91%	Rendah Sekali	Instruktif
2	2022	8.834.000,00	2.094.591.000,00	0.42%	Rendah Sekali	Instruktif
3	2023	50.363.500,00	2.235.868.000,00	2.25%	Rendah Sekali	Instruktif
4	2024	38.112.100,00	2.871.200.000,00	1.33%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari perolehan hasil yang dihitung pada Tabel 3.2 bisa diketahui tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Desa Karya Maju terbilang rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dimana lebih dominan peran pemerintah pusat dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah (daerah yang belum sanggup menjalankan otonomi daerah secara sendiri). Pada tahun 2021 persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan besaran 0,91%, selanjutnya pada tahun 2022 menurun 0,42%, pada tahun 2023 terjadi kenaikan 2,25% , dan pada tahun 2024 menurun lagi menjadi 1,33%. Selama empat tahun secara berkala selalu terjadi penurunan, dikarenakan berada pada persentase 0%-25% (rendah sekali) hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih bergantung terhadap bantuan dari pihak ekstren (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) yang masih tinggi.

3.1.3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Penghitungan rasio ini dengan melakukan perbandingan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah dengan jumlah penerimaan daerah. Rumus perhitungan rasio ini:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Perolehan hasil atas perhitungan rasio ketergantungan keuangan bisa dilihat tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan
Pemerintah Desa Karya Maju Tahun Anggaran 2021-2024

No	TA	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	(%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
1	2021	2.256.618.000,00	2.277.146.000,00	99.10%	Sangat Tinggi
2	2022	2.094.591.000,00	2.113.425.000,00	99.11%	Sangat Tinggi
3	2023	2.235.868.000,00	2.286.231.500,00	97.80%	Sangat Tinggi
4	2024	2.871.200.000,00	2.909.312.100,00	98.69%	Sangat Tinggi

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari perolehan hasil penghitungan Tabel 3.3 diatas bisa dilihat bahwa ketergantungan keuangan Pemerintah Desa Karya Maju terbilang tinggi sekali. Pada tahun 2021 persentase Rasio Kebergantungan finansial Daerah pada Pemerintah Desa Karya Maju yaitu 99,10%, tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan sebesar 99,11%, selanjutnya pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 97,80%, namun pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 98,69%. Hal ini memperlihatkan untuk pemerintahan desa memiliki tingkat kebergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat/provinsi.

3.1.4. Rasio Efektivitas

Penghitungan rasio ini melalui cara membandingkan realisasi penerimaan PADes sesuai target penerimaan PADes. Perumusan rasio ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes}} \times 100\%$$

Perolehan hasil perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Desa (PADes) bisa dilihat tabel 3.4 dibawah:

Tabel 3.4
Perhitungan Rasio Efektivitas PADes
Pemerintah Desa Karya Maju Tahun Anggaran 2021-2024

No	TA	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	(%)	Kriteria
1	2021	20.528.000,00	20.528.000,00	100%	Efektif
2	2022	8.834.000,00	8.834.000,00	100%	Efektif
3	2023	50.363.500,00	50.363.500,00	100%	Efektif
4	2024	38.109.600,00	38.112.100,00	99.99%	Efektif

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari perolehan hasil di Tabel 3.4 menunjukkan bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Desa Karya Maju tahun 2021 - 2023 dengan persentase 100% digolongkan efektif, dan tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 99,99% dikategorikan cukup efektif. Dapat diketahui secara keseluruhan yaitu

rata-rata rasio efektivitas PADes Karya Maju sebesar 100% merupakan kriteria efektif. Persentase rasio efektivitas pada Desa Karya Maju realisasi PADes di Desa Karya Maju sudah baik apabila dibandingkan target penerimaan PADes. Hal ini memperlihatkan bahwa penggapaian target dana desa telah efektif sebagaimana berdasarkan kriteria penilaian tingkat efektivitas yaitu sebesar 100% merupakan kriteria efektif.

3.1.5. Rasio Efisiensi Belanja

Penghitungan rasio ini dengan melakukan perbandingan realisasi belanja dengan anggaran belanja. Perumusan rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Perolehan hasil pada perhitungan rasio efisiensi belanja bisa dilihat pada tabel 3.5

Tabel 3.5
perhitungan Rasio Efisiensi Belanja
Pemerintah Desa Karya Maju Tahun Anggaran 2021-2024

No	TA	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	(%)	Kriteria
1	2021	2.383.252.700,00	2.537.308.700,00	93.93%	Tidak Efisien
2	2022	2.214.161.600,00	2.281.260.000,00	97.06%	Tidak Efisien
3	2023	2.087.608.500,00	2.207.881.500,00	94.55%	Tidak Efisien
4	2024	2.681.203.194,00	2.974.585.100,00	90.14%	Tidak Efisien

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari perolehan hasil penghitungan pada Tabel 3.5 memperlihatkan yaitu efisiensi belanja Pemerintah Desa Karya Maju naik turun pada tahun 2021 dengan persentase 93,93%, selanjutnya tahun 2022 meningkat menjadi 97,06%, namun di tahun 2023 menurun menjadi 94,55%, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 90,14% dengan demikian secara keseluruhan dikatakan tidak efisien. Hal ini memperlihatkan untuk pemerintah desa kurang efisien perihal mengelola anggaran dikarenakan rasio efisiensinya lebih dari 40%.

3.1.6. Rasio Pertumbuhan

Penggunaan rasio ini sebagai ukuran dari besaran kesanggupan pemerintah daerah perihal mempertahankan serta melakukan peningkatan kesuksesannya yang sudah digapai dari periode ke periode selanjutnya. Perumusan rasio ini yaitu:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{PADes Pn} - \text{PADes Po}}{\text{PADes Po}} \times 100\%$$

Perolehan hasil atas perhitungan rasio efisiensi belanja dilihat tabel 3.6 dibawah:

Tabel 3.6
Perhitungan Rasio Pertumbuhan
Pemerintah Desa Karya Maju Tahun Anggaran 2021-2024

No	TA	Pendapatan Asli Daerah(Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Kriteria
1	2021	20.528.000,00	-	-
2	2022	8.834.000,00	-56.97%	Sangat Rendah
3	2022	50.363.500,00	47.01%	Tinggi
4	2024	38.112.100,00	-24.33%	Sangat Rendah

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Dari hasil perhitungan Tabel 3.6 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Desa Karya Maju menunjukkan adanya fluktuatif. Pada tahun 2021 dengan persentase sebesar -56,97% dikategorikan sangat rendah. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan persentase 47,01% dikategorikan tinggi. Namun, pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan persentase menjadi -24,33% yang juga masuk dalam kategorikan sangat rendah.

Jika pertumbuhan pendapatan desa menunjukkan hasil yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa sudah terwujud secara optimal. Maka, pembangunan di desa tersebut bisa berjalan dengan lancar, memungkinkan perkembangan desa sesuai dengan yang diharapkan. Namun, Desa Karya Maju belum mampu dikatakan baik sebab pertumbuhan dana desa yang ada belum meningkat secara maksimal bahkan masih mengalami penurunan drastis.

3.2. Pembahasan

Perolehan setiap hasil rasio dapat diketahui kinerja Pemerintah Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna mempermudah pembahasan, perolehan hasil yang telah dihitung ditampilkan pada rangkuman perhitungan rasio tabel berikut :

Tabel 3.7
Hasil Perhitungan Rasio Keuangan
Pemerintah Desa Karya Maju Tahun Anggaran 2021-2024

No.	Uraian	Tahun Anggran				Rata-rata
		2021	2022	2023	2024	
1	Rasio Derajat Desentralisasi	0,90	0,42	2,20	1,31	1,21
2	Rasio Kemandirian Keuangan	0,91	0,42	2,25	1,33	1,23

	Daerah					
3	Rasio Ketergantungan Keuangan Derah	99,10	99,11	97,80	98,69	98,67
4	Rasio Efektivitas PADes	100	100	100	99,99	100
5	Rasio Efisiensi Belanja	93,93	97,06	94,55	90,14	93,91
6	Rasio Pertumbuhan PADes	-	-56,97	47,01	-24,33	-11,43

Sumber : Diolah oleh peneliti

1. Kinerja Keuangan Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Desa Karya Maju selama tahun anggaran 2021-2024 terjadi naik turun setiap tahunnya. Secara keseluruhan, rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Desa Karya Maju ialah 1,21%, yang tergolong pada kriteria sangat kurang, karena berada dalam persentase 0,00-10,00%. Riset ini sejalan dengan temuan (Harahap, 2020) di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang menunjukkan bahwa, seperti halnya Pemerintah Desa Karya Maju, daerah tersebut masih tidak semuanya sanggup perihal pembiayaan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan, terbilang sangat bergantung kepada pemerintahan pusat ataupun provinsi.

PADes Karya Maju tahun 2021 ialah dengan besaran Rp. 20.528.000,00 serta jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 2.277.146.000,00 sehingga menghasilkan rasio derajat desentralisasi pemerintah Desa Karya Maju ialah 0,90% tergolong kurang sekali. Pada tahun 2022 PADes Karya Maju mengalami penurunan menjadi Rp. 8.834.000,00 serta jumlah penghasilan desa dengan besaran Rp. 2.113.425.000,00 sehingga rasio derajat desentralisasi pemerintah Desa Karya Maju menurun menjadi 0,42% yang masih tergolong dalam kriteria kurang sekali. Tahun 2023 PADes Karya Maju dengan besaran Rp.50.363.500,00 serta jumlah perolehan desa yaitu Rp. 2.286.231.500,00 sehingga mengalami kenaikan rasio derajat desentralisasi pemerintah Desa Karya Maju menjadi sebesar 2,20% tergolong kriteria sangat kurang. Tahun 2024 PADes Karya Maju dengan besaran Rp. 38.112.100,00 serta jumlah penghasilan desa dengan besaran Rp. 2.909.312.100,00 sehingga mengalami penurunan rasio derajat derajat desentralisasi pemerintah Desa Karya Maju menjadi sebesar 1,31% termasuk kriteria sangat kurang. Dikarenakan berada pada persentase 00,00-10,00%. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Maulina dan Rhea, 2019) menggolongkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kategori cukup baik dengan proporsi berkisar antara 30,01% sampai dengan 40,00%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan tanggung jawab dan akuntabilitas yang cukup kepada Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian kinerja keuangan Pemerintah Desa Karya Maju berada pada persentase 00,00-10,00% persentase ini menunjukkan bahwa desa tersebut tidak sepenuhnya sanggup membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang masih sangat bergantung perihal sumbangsih atas pemerintahan pusat

ataupun pemerintah provinsi setempat.

2. Kinerja Keuangan Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan

Dari perolehan hasil penghitungan rasio ini Desa Karya Maju tahun anggaran 2021 - 2024 secara keseluruhan menunjukkan kondisi stagnan. Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Desa Karya Maju secara keseluruhan yaitu 1,23% terbilang kriteria rendah sekali serta berada pada pola korelasi instruktif. Riset ini sejalan dengan peneliti (Markus Rivaldo Yulinchton dkk, 2022) bahwa tingkat kemandirian pemerintah Kabupaten Tegal masih rendah dengan persentase 18,52% yang menunjukkan APBDes nya masih bergantung pada dana transfer pemerintahan pusat.

Pada tahun 2021 PADes Karya Maju tercatat sebesar Rp. 20.528.000,00 sedangkan bantuan dari pemerintah Pusat/Provinsi mencapai 2.256.618.000,00 menghasilkan rasio kemandirian keuangan Desa Karya Maju dengan besaran 0,91% tergolong kriteria sangat rendah. Pada tahun 2022 PADes Karya Maju dengan besaran 8.834.000,00 sementara bantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi sebesar 2.094.591.000,00 sehingga rasio kemandirian keuangan Desa Karya Maju turun menjadi 0,42% dan tetap berada dalam kriteria rendah sekali. Sementara itu, pada tahun 2023 PADes Karya Maju meningkat menjadi Rp. 50.363.500,00 serta bantuan dari pemerintah Pusat/Provinsi dengan besaran Rp. 2.235.868.000,00 hasil rasio kemandirian keuangan desa Karya Maju tahun 2023 sebesar 2,25% yang mana mengalami kenaikan dari tahun 2022 dan rasio kemandirian keuangan 2023 tergolong rendah sekali. Tahun 2024 mengalami penurunan PADes dengan jumlah Rp. 38. 112.100,00 dan pendapatan transfer Rp. 2.871.200.000,00 dengan rasio persentase 1,33% dengan kriteria masih sangat rendah. Tingkat kemandirian keuangan keseluruhan dari Pemerintah Desa Karya Maju terbilang rendah sekali, karena masih dalam persentase 0%-25% pola hubungan keuangan desa ini termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat sangat dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah yang mandiri, menunjukkan bahwa desa tidak sanggup menjalankan otonomi daerahnya dengan optimal. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya. (Amelia, 2020) pada Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat bahwa Desa Margorejo memiliki tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi dibandingkan ketergantungannya pada bantuan dari pemerintah pusat.

3. Kinerja Keuangan Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dari perolehan hasil penghitungan, rasio ini Desa Karya Maju pada tahun anggaran 2021-2024 mengalami naik turun, dengan peningkatan serta penurunan persentase di setiap tahunnya. Secara keseluruhan, rata-rata rasio ketergantungan keuangan Desa Karya Maju ialah 98,67%, yang masuk pada kriteria sangat tinggi. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Harahap, 2020) yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat, yakni sebesar 94,03%.

Pendapatan transfer pemerintah Desa Karya Maju pada tahun 2021 dengan besaran Rp. 2.256.618.000,00 serta jumlah penghasilan sebesar Rp. 2.277.146.000,00 maka rasio kebergantungan finansial Desa Karya Maju tersebut dengan besaran 99,10% yang tergolong dalam kriteria sangat tinggi. Pada tahun 2022 penghasilan transfer pemerintah Desa Karya

Maju dengan besaran Rp. 2.094.591.000,00 serta jumlah pendapatan Desa sebesar Rp. 2.113.425.000,00 menghasilkan rasio ketergantungan keuangan yaitu 99,11% yang juga tergolong kriteria tinggi sekali. Pada Tahun 2023 penghasilan transfer pemerintah Desa Karya Maju dengan besaran Rp. 2.235.868.000,00 serta jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.286.231.500,00, sehingga rasio ketergantungan keuangan Desa Karya Maju mengalami sedikit penurunan dari 2023 menjadi 97,80%. Tahun 2024 pendapatan transfer pemerintah Desa Karya Maju sebesar Rp. 2.781.200,00 serta jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.909.312.100,00 sehingga rasio ketergantungan keuangan Desa Karya Maju mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2023 menjadi 98,69%. Secara keseluruhan, tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Desa Karya Maju tergolong sangat tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh persentase >50,00%. Hal ini memperlihatkan bahwa desa tersebut bergantung sekali dengan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan pendapat (Mahmudi, 2019) yang menyatakan bahwa apabila rasio ketergantungannya besar, maka pemerintah daerah akan sangat bergantung kepada pemerintah pusat.

4. Kinerja Keuangan Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Rasio Efektivitas PAD

Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PADes Karya Maju tahun 2021–2024 menunjukkan adanya penurunan sebesar %. Hal ini terlihat dari rata-rata Rasio Efektivitas PADes Karya Maju yang termasuk kriteria efektif sebesar 100%. Riset ini didukung oleh penelitian (Nur asiah dkk, 2023) bahwa rasio efektivitas Limbur Merangin selama tahun 2017-2022 mempunyai kategori telah efektif.

Realisasi penerimaan PADes Karya Maju tahun 2021 ialah Rp. 20.528.000,00 serta anggaran penghasilan desa Rp. 20.528.000,00 sehingga rasio efektivitas PADes Karya Maju adalah sebesar 100% dalam kriteria efektif. Tahun 2022 realisasi pendapatan desa sebesar Rp. 8.834.000,00 serta anggaran penghasilan desa ialah Rp. 8.834.00,00 sehingga rasio efektivitas PADes sebesar 100%. Tahun 2023 realisasi penghasilan asli desa ialah Rp. 50.363.500,00 dan anggaran penghasilan desa ialah Rp. 50.363.500,00 sehingga rasio efektivitas PADes sebesar 100%, sehingga dikategorikan efektif karena persentasenya 100%. Hal ini disebabkan oleh keseimbangan antara penerimaan hasil desa dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan desa mencapai Rp. 38.109.600,00, sedangkan anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 38.112.100,00, dengan rasio efektivitas sebesar 99,99%, yang masuk pada kriteria cukup efektif. Rata-rata rasio efektivitas secara keseluruhan pada PADes Karya Maju tergolong efektif, dengan persentase 90-100%, yaitu mencapai 100%. Pemerintah Desa Karya Maju juga menunjukkan kinerja yang baik dalam merealisasikan PADes sesuai dengan perencanaan. Kesimpulan ini bertolak belakang dengan penelitian (Dali dkk, 2021) yang menemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Muna relatif kurang mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi aktual yang diinginkan.

5. Kinerja Keuangan Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja

Dari perolehan hasil penghitungan, Rasio Efisiensi Belanja Desa Karya Maju pada tahun 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi, dengan peningkatan serta penurunan persentase di masing-masing tahunnya. Secara keseluruhan, rata-rata rasio efisiensi belanja Desa Karya Maju

ialah 93,13%, yang termasuk pada kriteria belum efisien dikarenakan persentasenya $>40\%$. Temuan ini sejalan dengan riset oleh (Rusnani dan Ahmad, 2023), menjelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Waringin Timur kurang efisien dalam mengelola anggaran pada tahun 2019 dan 2020.

Realisasi belanja Desa Karya Maju tahun 2021 ialah Rp. 2.383.252.700,00 dan anggaran belanja Desa Karya Maju sebesar Rp. 2.357.308.700 maka rasio efisiensi belanja Desa Karya Maju dengan besaran 93,93% tergolong kriteria kurang tepat. Tahun 2022 realisasi belanja Desa Karya Maju ialah Rp. 2.214.161.600,00 dan anggaran belanja Desa Karya Maju adalah sebesar 2.281.260.00,00 sehingga rasio efisiensi belanja Desa Karya Maju mengalami kenaikan dari tahun 2021 menjadi 97,06%. Tahun 2023 realisasi belanja Desa Karya Maju sebesar Rp. 2.087.608.500,00 dan anggaran belanja Desa Karya Maju adalah sebesar Rp. 2.207.881.500,00 sehingga rasio efisiensi belanja Desa Karya Maju mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 menjadi 94,55% serta tergolong kriteria kurang efisien. Tahun 2024 realisasi belanja Desa Karya Maju dengan besaran Rp. 2.681.203.194,00 dan anggaran belanja Desa Karya Mau adalah sebesar Rp. 2.974.585.100,00 sehingga rasio efisiensi belanja Desa Karya Maju mengalami sedikit penurunan dari tahun 2023 menjadi 90,14% dan termasuk kriteria tidak efisien. Secara keseluruhan, rasio efisiensi belanja Desa Karya Maju tergolong tidak efisien, dengan persentase berada dalam kisaran 90-100%, yakni sebesar 93,91%. Faktor kondisi ini ialah tingginya biaya pengeluaran pemerintah daerah pada proses penghimpunan penghasilan. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah yang berkelanjutan dalam memaksimalkan pelaksanaan pembangunan daerah dan pengelolaan pemerintahan. Temuan riset ini berlawanan dengan hasil riset oleh (Efriani Sumastuti dkk, 2020), menyatakan bahwa selama periode 2013-2017, Kota Semarang dinilai sangat efektif dalam mengelola APBDes.

6. Kinerja Keuangan Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Dari perolehan hasil perhitungan, rasio pertumbuhan penghasilan Desa Karya Maju pada tahun 2021 - 2024 terjadi naik turun, adapun rata-rata dari pertumbuhan penghasilan Asli Desa (PADes) ialah 11,43%. Hal ini memperlihatkan bahwa Desa Karya Maju tidak sanggup mempertahankan pertumbuhan PADes dengan demikian pertumbuhan perolehan asli daerah belum stabil. Rata-rata pertumbuhan secara keseluruhan PADes Karya Maju tercatat ialah -11,43%, yang tergolong pada kriteria sangat rendah. Riset ini searah dengan temuan (Markus Rivaldo Yulinchton dkk, 2022) di Pemerintah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, yang memperlihatkan bahwa rasio pertumbuhan negatif mengindikasikan kurang optimalnya pengelolaan sumber-sumber penerimaan PADes di Kabupaten Tegal.

Pada tahun 2022, PADes Karya Maju tercatat sebesar Rp8.834.000,00, dengan rasio pertumbuhan PADes mencapai -56,97%. Sementara itu, pada tahun 2023, PADes Karya Maju meningkat menjadi Rp50.363.500,00. sehingga rasio pertumbuhan PADes Pemerintah Desa Karya Maju mengalami kenaikan menjadi 47,01%. Tahun 2024 PADes Karya Maju adalah sebesar 38.112.100,00 sehingga rasio pertumbuhan PADes Pemerintah Desa Karya Maju mengalami penurunan menjadi -24,32%. Secara keseluruhan, rata-rata rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) Karya Maju menunjukkan tren negatif, dengan persentase sebesar -11,43%. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa tidak sanggup mengoptimalkan realisasi anggaran. Temuan riset ini berlawanan dengan hasil dari (Husain,

2020) di Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, yang mencatat pertumbuhan positif. Kinerja pendapatan Desa Baroko telah berhasil merealisasikan PADes secara efektif, sehingga menghasilkan tren pertumbuhan yang lebih baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Karya Maju Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan memiliki kinerja keuangan yang sangat buruk pada periode tahun 2021–2024 yang diukur berdasarkan rasio derajat desentralisasi. Hal ini diperlihatkan oleh rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi dengan besaran 1,21%, yang masih berada dalam kategori sangat kurang dengan kisaran 0,00-10,00%.

Bila dibandingkan dengan rasio kemandirian keuangan daerah pada kurun waktu yang sama, kinerja keuangan Desa Karya Maju sangat buruk dan terus mengikuti tren korelasional yang sama, dengan rasio kemandirian keuangan rata-rata sebesar 1,23%. Namun, rasio ketergantungan keuangan daerah yang rata-rata sebesar 98,67% menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembayaran transfer.

Dari aspek rasio efektivitas selama tahun 2021-2024, kinerja keuangan Desa Karya Maju dapat dikategorikan efektif, dengan rata-rata persentase sebesar 100%. Namun, jika ditinjau dari rasio efisiensi belanja, kinerja keuangan desa dinilai tidak efisien, dengan rata-rata persentase 93,91%, yang masih tergolong dalam kategori >40%.

Sementara itu, jika dilihat dari rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Desa (PADes) selama periode 2021-2024, kinerja keuangan Desa Karya Maju menunjukkan tren yang fluktuatif. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, namun terjadi penurunan tahun 2024 akibat adanya pertumbuhan negatif, dengan rata-rata rasio pertumbuhan PADes tercatat sebesar -11,43%.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan terutama kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini dan kepada Program Studi Manajemen Keuangan Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jambi.

6. REFERENSI

- Amelia Oktrivina Siregar, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan,” *Image: Jurnal Riset Manajemen* 9, no. 1 (2020).
- Arum, Ruki Ambar, MM SE, S. E. Yuyun Wahyuni, S. E. Rida Ristiyana, M. Ak, S. E. Umi Nadhiroh, S. E. I. Iwan Wisandani, Diana Widhi Rachmawati, S. E. Hilda, and Retno Ika Sundari. *Analisis Laporan Keuangan: Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Rasio Keuangan*. Media Sains Indonesia, 2022.
- Asiah, Nur. “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Limbur Merangin Kabupaten Merangin.” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 15–21.
- Dali, Nasrullah, Mulyati Akib, and Wa Haisa. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 1 (2021): 319–336.

- Frederic W.Nale, Pricilia A.V. Meomanu, Kamilaus Konstanse Oki. "Rasio Kemandirian Keuangan - Google Scholar." Accessed December 10, 2024.
- Harahap, Heri Faisal. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (2020): 34–38.
- Hasan, H. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang." *Makassar: Universitas Muhammadiyah* (2020).
- Hery Susanto, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram," *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* 7, no. 1 (2019).
- Indiskayani, Indiskayani, Titin Agustin Nengsih, and Anggraini Dessy. "Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sribunga." *e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter* 12, no. 2 (2024): 1–11.
- Ita Siti Patonah, Yekti Nilasari, and Triani Patra Pertiwi. "Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa." *Jendela ASWAJA* 4, no. 02 (2023): 27–39.
- Mahmud Rifa'i and Wawan Tri Juniarto, "Kewenangan Bupati Terhadap Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kabupaten Madiun (Pendekatan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis)," *Pancasila bureaucracy, Journal of Regional Government, Development and Innovation* 4, no. 1 (2022): 54–71.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Upp Stim Ykpn, 2019.
- Mahsun, M. "Pengukuran Kinerja Sektor Publik (BPFE." *Yogyakarta: BPFE* (2012).
- Mahsun, Mohamad. "Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE." *Muhammad, Ikram* (2015), *Pengaruh Pengawasan Pimpinan Terhadap Kinerja Pada* (2009).
- Markus Rivaldo Yulinchon, Maria Bernadette Nani Ariani, and Nunuk Triwahyuningtyas. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 11, no. 2 (2022): 303–314.
- Maulina, Fera, and Rhea Rhea. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)." *Obis* 2, no. 1 (2019): 11–22.
- Mega Oktavia Ropa, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4, no. 2 (2016). hlm.741.
- Mutiha, Arthaingan H. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014" 4 (2010).
- Pasaribu, Rakkas Dermawan. "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2014-2017" (2019). Accessed February 8, 2025.

- Rahmadani, Rusnani, and Ahmad Rudini. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018-2021." *Profit: Jurnal Penerapan Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 8, no. 2 (2023): 133–143.
- Rasta Seviafani Hidayat, Norita Citra Yuliarti dan Moh.Halim, "Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 28 Oktober 2023, hlm.236.
- Siregar, Amelia Oktrivina. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan." *Image: Jurnal Riset Manajemen* 9, no. 1 (2020): 1–19.
- Santoso, Ruddy Tri, Muhammad Syukri, and Ni'matul Hasanah. "Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 1, no. 1 (2021): 75–94.
- Sartika, Novira. "Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti." *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 7, no. 2 (2019): 147–153.
- Seri Suriani, *Analisis Laporan Keuangan: Kinerja Manajemen Dan Prospek* (Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm.23.
- Sitinjak, Yosef Karel. "Penataan Kebijakan Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya." *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2023): 1249–1270.
- Sumastuti, Efriyani, Eriza Nariyanti, and Ika Indriasari. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013-2017." *Indicators: Journal of Economic and Business* 2, no. 2 (2020): 97–104.
- Yulinchton, Markus Rivaldo, Maria Bernadette Nani Ariani, and Nunuk Triwahyuningtyas. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* 11, no. 2 (2022): 303–314.